

PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

I Wayan Suardika

Program Studi Magister Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Dwijendra

Email : suardika_wyn@yahoo.com

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial masyarakat di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dengan membaca jurnal yang di ambil dari Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat di temukan bahwa melalui penyuluh kehutanan, teknologi berupa ide-ide baru, metode pemberdayaan tanaman secara vegetative sampai kepada masyarakat melalui saluran komunikasi berupa pertemuan kelompok, pembelajaran lapangan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh penyuluh kehutanan. Kinerja penyuluh kehutanan dalam membina Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata yang diperoleh 42,42 dari skor harapan 54. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Bone Bolango Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan peran penyuluhan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial terbagi dalam enam indikator dimana total persentase jawabannya sebesar 74,16% dengan memiliki kategori baik. Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa fungsi penyuluh sebagai sumber informasi dapat dioptimalkan lebih baik lagi karena anggota kelompok belum banyak yang bertanya ke penyuluh dalam mencari informasi di SPKP Taman Nasional Karimunjawa. Pihak pengambil kebijakan perlu memacu peningkatan peran dan kinerja penyuluh kehutanan, melalui penyelenggaraan pelatihan yang terintegrasi.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan

Abstract

This research aims to understand the role of forestry instructors in the social changes of communities in villages bordering forest areas that implement social forestry programs. The research design used is a literature study, a form of research conducted by reviewing journals from Google Scholar. The research results show the role of forestry instructors in social change in Tunggul Boyok Village, Bonti District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. It was found that through forestry instructors, technology in the form of new ideas and methods for the vegetative empowerment of plants reaches the community through communication channels such as group meetings and field learning through training sessions organized by forestry instructors. The performance of forestry instructors in fostering People's Forest Farmer Groups in Panawangan District, Ciamis Regency, falls into the high category, with an average score of 42.42 out of an expected score of 54. Based on the results of field research in Bone Bolango Regency, Bondawuna Village, South Suwawa District, the role of extension in the implementation of the social forestry program is divided into six indicators, with a total response percentage of 74.16%, categorized as good. Based on the research findings, it can be seen that the role of the instructor as a source of information can be further optimized because not many group members have asked the instructor for details at the SPKP Karimunjawa National Park. Policymakers need to accelerate the enhancement of the role and performance of forestry instructors through the organization of integrated training.

Keywords: Social Forestry, Forestry Instructor

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sebesar 129 juta ha. Hutan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan fungsi hutan yaitu dibagi menjadi produksi, lindung, konservasi. Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya lahan kritis memberikan berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis tersebut. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

tentang Kehutanan dan dalam peraturan perundangan lainnya telah mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan harus lebih menitik beratkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumberdaya yang ada di dalamnya, termasuk aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius.

Perhutanan sosial menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Bentuk-bentuk perhutanan sosial antara lain: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Perhutanan sosial pada dasarnya adalah pendekatan yang dilakukan untuk mitigasi peningkatan deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi dampak negatif dari aktivitas masyarakat lokal di hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam melakukan pengelolaan hutan (Kumar, 2015). Upaya ini sebagai salah satu cara mengembalikan fungsi hutan lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Penyuluh kehutanan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Penyuluh kehutanan memiliki peran penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat di sekitar hutan agar mampu dan mau ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial masyarakat di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial. Mempertahankan fungsi kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di tengah semakin tingginya kepentingan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan keterlibatan banyak pihak agar terjadi keseimbangan antara upaya pelestarian hutan dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sehingga perlu diadakan penelitian peran penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak untuk keberhasilan program perhutanan sosial.

Dalam perhutanan sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*) (Maryudi *et al.*, 2012). Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan implementasi perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Program perhutanan sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019). Pendampingan dalam penguasaan hutan untuk memastikan *good governance* dalam melakukan pengelolaan hutan, menyelesaikan konflik sosial akibat perambahan hutan, dan mengurangi kekuatan jaringan pengijon dan *middle man* di dalam rantai industri perdesaan berbahan baku hasil hutan (Rahayu, 2020).

Tiga pilar pokok yang menentukan keberhasilan perhutanan sosial yaitu, a) masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan yang mau dan mampu membentuk kelompok atau gabungan kelompok, b) kesiapan, kemampuan dan keterampilan penyuluh kehutanan dan pendamping kegiatan perhutanan sosial, c) kesiapan, kemauan dan kemampuan pemerintah dalam hal ini KLHK cq Ditjen

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam memfasilitasi (perizinan, permodalan, pemasaran dan sebagainya) kegiatan perhutanan sosial (Susetyo, 2020).

2. METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dengan membaca jurnal yang di ambil dari Google Scholar. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai November 2024. Menurut Arikunto, 2006 dalam Aprianto, dkk. 2020) populasi adalah keseluruhan objek penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi jurnal dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah penyuluh kehutanan. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang di miliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2008 dalam Aprianto, dkk.,2020). Sampel pada penelitian ini adalah jurnal penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi: a. Jurnal terbitan 2010-2020 atau (10 tahun terakhir) b. Jurnal penelitian yang full text c. Jurnal Nasional atau Internasional. Kriteria eksklusi: a. Jurnal terbitan kurang dari 10 tahun terakhir b. Jurnal penelitian yang tidak full tex c. Jurnal penelitian yang hanya terdiri dari abstrak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan kehutanan merupakan proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Penyuluh kehutanan mempunyai peran strategis dan menjadi ujung tombak pembangunan kehutanan. Sesuai dengan amanah dalam UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap jenis kegiatan pembangunan kehutanan baik aspek perencanaan hutan, rehabilitasi hutan/lahan, pemanfaatan hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam semuanya memerlukan dukungan penyuluhan kehutanan. Sehingga otomatis peran penyuluh kehutanan dalam setiap kegiatan kehutanan sangat diperlukan.

Ada 3 status penyuluh kehutanan yaitu penyuluh kehutanan Aparatur Sipil Negara adalah pegawai (Jabatan Fungsional tertentu) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. Tugas pokok penyuluh kehutanan terkait pada aspek-aspek, diantaranya : 1. Pengukuhan kawasan hutan 2. Perhutanan sosial 3. Pemanfaatan hutan 4. Penggunaan kawasan hutan 5. Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam 6. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan 7. Sumber daya manusia kehutanan 8. Peraturan perundang-undangan terkait Program dan Materi.

A. Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Program Perhutanan Sosial

Penyuluh kehutanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membentuk perubahan sosial masyarakat, karena penyuluh bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu

berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluh kehutanan harus terus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandiriannya dalam usaha/kegiatan berbasis kehutanan. Penyuluh kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya mensejahterakan masyarakat. (Mulyono, 2011 dalam Pandoyo, dkk., 2023)

Peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dibagi dengan tiga indikator pengamatan yaitu materi yang diberikan, terbentuknya kelompok tani dan perilaku penyuluh/ komunikator. Di dalam penelitian ini di temukan bahwa melalui penyuluh kehutanan, teknologi berupa ide-ide baru, metode pemberdayaan tanaman secara vegetative sampai kepada masyarakat melalui saluran komunikasi berupa pertemuan kelompok, pembelajaran lapangan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh penyuluh kehutanan. Ide-ide diadopsi oleh masyarakat. Contohnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budidaya pertanian karet lokal ke karet unggul yang teknologinya sudah di kembangkan sendiri oleh masyarakat. Inovasi dan pengembangan yang juga dilakukan penyuluh kehutanan seperti memfasilitasi pemasaran madu alam yang dulunya hampir tidak pernah dijual keluar. Tingginya persepsi masyarakat terhadap perilaku penyuluh disebabkan oleh keahlian penyuluh dalam menarik dan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa informasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi pengembangan hidupnya. Menurut Pudji Muljono (2006) salah satu peran penyuluh kehutanan adalah pendampingan masyarakat, tahap awal dari proses pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk melihat keberhasilan penyuluh dan kegiatan penyuluhan adalah dalam pembentukan dan pembagunan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Penyuluh kehutanan harus berperan dalam memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelompok/kelembagaan yang kuat dan mandiri. Pada gilirannya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama, dan jejaring kerja antar kelompok, antar desa dan antar kecamatan (Pandoyo, dkk., 2023).

Penyuluh kehutanan bertugas memberikan pengarahan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan yang mengelola hutan rakyat. Pengarahan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Melalui kebutuhan masyarakat tersebut, masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan/tugasnya. Kinerja penyuluh kehutanan dalam membina Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata yang diperoleh 42,42 dari skor harapan 54. Tingkat partisipasi petani dalam mengelola hutan rakyat masuk dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata yang diperoleh 49,89 dari skor harapan 66. Terdapat hubungan yang sangat nyata antara variabel kinerja penyuluh kehutanan dengan tingkat partisipasi petani yang tergabung pada Kelompok Tani Hutan Rakyat dalam mengelola hutan rakyat di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis (Hardianto, dkk., 2021).

Peran penyuluhan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber informasi, pendampingan, pemecah masalah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan

petani untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Mardikanto, 2009). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bone Bolango di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan sudah diadakan sosialisasi, dimana lembaga penyuluhan melakukan pengenalan program perhutanan sosial kepada masyarakat terlebih dahulu jika seandainya masyarakat dan pihak desa menerima program perhutanan sosial yang disosialisasikan oleh lembaga penyuluhan maka penyuluh melakukan fasilitasi usulan berupa pendampingan. Peran penyuluhan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang terbagi dari enam indikator diantaranya meliputi kondisi sosial ekonomi, peran penyuluhan dalam sosialisasi program HKM, peran penyuluhan dalam permohonan izin, peran penyuluhan dalam penandaan batas, peran penyuluhan dalam pengembangan kelembagaan kelompok, dan peran penyuluhan dalam rencana kerja hutan kemasyarakatan. dimana total persentase jawabannya sebesar 74,16% dengan memiliki kategori baik. dengan adanya program perhutanan sosial terlebih khusus program hutan kemasyarakatan (HKM), masyarakat petani dapat meningkatkan hasil produksi mereka dibidang pertanian yang nantinya akan berpengaruh besar didalam kondisi perkonomi petani yang ada di Desa Bondawuna. dengan adanya program perhutanan sosial ini masyarakat mampu melindungi hutan serta mengelola dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2016 tentang Perhutanan Sosial. Hal ini membuat masyarakat semangat dan menerima adanya program perhutanan sosial (Hujani, dkk.,2019).

B. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan

Salah satu bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan yang efektif adalah melalui bentuk pemberdayaan kelompok. Pendekatan kelompok mempunyai kelebihan karena lebih luas daya jangkauannya, dan sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan yang lebih komunal. Kelompok juga memiliki fungsi diantaranya sebagai wadah proses pembelajaran dan wahana dalam bekerjasama antar masyarakat (Utama, dkk. 2010). Dalam UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum bahwa pelaku utama dalam kegiatan kehutanan yaitu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Di Taman Nasional Karimunjawa telah terbentuk Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) “Mangga Delima”, yang diharapkan dapat memberikan ruang pembelajaran bagi masyarakat, khususnya mengenai pola-pola pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara arif dan bijaksana. Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa fungsi penyuluh sebagai sumber informasi dapat dioptimalkan lebih baik lagi karena anggota kelompok belum banyak yang bertanya ke penyuluh dalam mencari informasi. Dalam hal dinamika kelompok, struktur kelompok seperti pembagian tugas serta pembinaan dan pengembangan kelompok sangat penting untuk ditingkatkan mengingat SPKP “Mangga Delima” memiliki potensi yang cukup baik dalam mengembangkan para anggota kelompoknya (Yani, dkk., 2017).

Penyuluh kehutanan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial. Hasil penelitian penyuluh kehutanan di Kalimantan Selatan mendapat tingkat kinerja sedang dengan rata-rata nilai 74,42. Pihak pengambil kebijakan perlu memacu peningkatan peran dan kinerja penyuluh kehutanan, melalui penyelenggaraan pelatihan yang terintegrasi pada peningkatan

kompetensi penyuluh kehutanan yaitu kemampuan merencanakan program penyuluhan dan kemampuan kepemimpinan penyuluh (Rahmiyati 2021).

Status keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial di Hutan Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana dengan menggunakan metode *Multi Dimensional Scalling* (MDS), adalah cukup berkelanjutan dari dimensi lingkungan (nilai 55,48 %), dimensi ekonomi (nilai 68,40 %), dimensi sosial budaya (nilai 52,75 %), serta dimensi hukum dan kelembagaan (nilai 52,76 %). Atribut yang paling sensitif pada dimensi sosial budaya yaitu kurangnya pemahaman, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap hutan dengan nilai 27,43. Untuk itu arahan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan diarahkan pada peningkatan pemahaman, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap hutan. Arahan programnya yaitu penyuluhan, peran masyarakat adat, pengembangan agroforestri dan penataan tegakan pohon, konservasi keanekaragaman hayati, melaksanakan reboisasi, memperluas jenis pasar produk hutan, pembayaran PNBP, pengendalian penambahan ladang pertanian. (Suardika, 2022).

Pelaksanaan penyuluhan mengalami perubahan karena terjadi perubahan perilaku masyarakat pada saat munculnya pandemi Covid-19 yang telah membuat perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor kegiatan, salah satunya kegiatan penyuluhan kehutanan. Penelitian dilakukan di KPH Bulusaraung, Kabupaten Maros yang bertujuan untuk mengetahui proses penyuluhan dan sarana penyuluhan kehutanan yang terdisrupsi selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kebijakan penyuluhan kehutanan sempat tertunda beberapa bulan akibat covid-19 dikarenakan masyarakat enggan bertemu dengan penyuluh yang datang dari pusat kota mengingat virus covid-19 ini masih ada. Akibatnya para penyuluh belum terbiasa melakukan pemberian materi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan melakukan evaluasi menurut kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fasilitas yang ada sebelum pandemi dan masa pandemi pada hal-nya sama saja, akan tetapi pada saat penyuluh menemui masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran WHO (Astuti,2022).

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang terlibat. Lebih khusus lagi kualitas penyuluh kehutanan atau tenaga pendamping. Persoalan pokok dan mendasar pada penyuluh kehutanan adalah kurang atau minimnya pendidikan dan pengajaran. Sejak otonomi daerah, kewenangan, pengaturan dan pembinaan penyuluh kehutanan beralih ke pemerintah daerah. Praktis intensitas dan frekuensi pendidikan dan latihan berkurang. Peningkatan dan pengembangan kapasitas individu penyuluh stagnan. Pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan perhutanan sosial merupakan hal baru bagi penyuluh kehutanan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyuluh kehutanan bisa berperan optimal untuk mendampingi program KLHK ditingkat tapak yang melibatkan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas individu penyuluh kehutanan kuncinya adalah pendidikan dan pelatihan. Persoalan pokok dan mendasar lainnya dalam pengembangan penyuluh kehutanan adalah minim/kurangnya jumlah penyuluh kehutanan baik pegawai negeri maupun pegawai kontrak. Pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping perhutanan sosial bisa dilakukan oleh penyuluh kehutanan, atau pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau perorangan. Program perhutanan sosial sifat pendampingannya wajib, sehingga target, kinerja dan keberhasilan penyuluh kehutanan terukur (Susetyo 2021).

4. PENUTUP

Simpulan penelitian ini adalah penyuluh kehutanan memegang peranan yang penting dan vital dalam mensukseskan program perhutanan sosial dan perannya sangat dirasakan oleh masyarakat, tetapi di beberapa daerah kapasitas penyuluh kehutanan perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, H. 2020. Studi Literatur Efek Farmakologi Ekstrak Daun Johar (*Cassia Siamea Lamk*). Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Diunduh 12 November 2024. Tersedia dari URL:<https://repositori.ummat.ac.id>.
- Astuti, W. P. 2022. Disrupsi Perubahan Sistem Penyuluhan dan Sarana Penyuluh Perhutanan Sosial Selama Pandemi Covid-19. Sikripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makasar.
- Hardianto, D., Dedi Sufyadi, Suharjadinata. 2021. Hubungan Antara Kinerja Penyuluh Kehutanan Dengan Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat. *Agribusiness System Scientific Journal*. Program Pasca Sarjana Program Studi Agribisnis Universitas Siliwangi, 1 (1):1-9.
- Hujani, E., Irwan Bempah, Yanti Saleh. 2019. Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. *Agrinesia Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 3(3):156-162.
- Kumar, V. 2015. Social Forestry In India: Concept and Schemes. *Jurnal Van Sangyan*, 2(11):18-20.
- Mardikanto. 1999. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanti, C. Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchana-phatarawit, R., and Krott, M. 2012. Back to Basics : Considerations in Evaluating The Outcomes of Community Forestry Elsevier: *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5.
- Pandoya, F.M.R., Sofyan Zainal, Purwati. 2023. Peran Penyuluh Kehutanan Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. *Jurnal Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura* : 390-398.
- Rahayu, N.H. 2020. Arah Kebijakan Perhutanan Sosial di dalam RPJMN 2020-2024. Naskah lengkap Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Jakarta, 11 Agustus 2020.
- Rahmiyati. 2021. Peran dan Kinerja Penyuluh Kehutanan Pada Proram Perhutanan Sosial Di Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis. Program Studi Magister Kehutanan Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.
- Suardika, I. W. 2022. Keberlanjutan dan Arah Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Hutan Desa Yehsumbul Kabupaten Jembrana. Desertasi. Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar.
- Supriyanto, B. 2019. Inovasi Kebijakan Perhutanan Sosial. *Naskah Lengkap Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kehutanan Ke-5 Universitas Sumatera Utara*. Medan, 12 November 2019.
- Susetyo, P. D. 2020. Kualitas Perhutanan Sosial. {Diunduh 9 Oktober 2021} Tersedia dari : URL: <http://www.agroindonesia.co.id/2020/04/kualitas-perhutanan-sosial/>
- Susetyo, P. D. 2021. Peran KTH dan Penyuluh dalam Perhutanan Sosial. {Diunduh 12 November 2022} Tersedia dari: URL: <http://www.forestdigest.com>.
- Utama, S., Sumardjo, D. Susanto, D.S. Gani. 2010. Dinamika Kelompok Tani Hutan pada Pengelolaan Hutan Produksi Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 6 (1): 49-64.

Yani, D. E., Idha Farida. 2017. Dinamika Kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan dan Pedesaan Mangga Delima Taman Nasional Karimun Jawa. *JSP*, 10(3):58-67.